

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, M. (2011). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Asas - Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas - Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, M. Nawawi. (2010). *Teori - Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atikah, I. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (2013). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hidayati, R. (2021). *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ilyas, A. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana* . 38: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- M.Y. Al-Barry, D. (2013). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marlina, A. (2022). *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Medi Aksara.
- Moeljanto. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljanto. (2009). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni.

Nawawi, B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.

Sadewo, F. A. (2022). *Sejarah Dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Cirebon: Pt. Djawa Sinar Perkasa.

Simon R, A., & Sunaryo, T. (2010). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: Lubuk Agung.

JURNAL :

Adiyatna, F. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4)
DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>

Ayu Kusuma Dewi, N., Wiratny, N., & Suandika, I. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Sesuai Dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2).

Azed, A., Muslih, M., & Marliansyah, F. (2023). Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. *Legalitas: Jurnal Hukum*.15(2).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1) DOI : <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2015). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif*, 20(2).

Fitri, E., & Wahyudhi, D. (2023). Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Journal Of Criminal*, 2(3), DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990>

H.Situmorang, V. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement). *Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)*.

Khasanah, Monica Lutfiyati (2014). Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong.

Novum: Jurnal Hukum, 1(4). DOI :
<https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.10743>

Novita. (2022). Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

Rahman, I. (2020). Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.84-116>

Simarmata, B. (2011). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris. *Mimbar Hukum*, 2(3), DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16171>

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan diubah Terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Badan Negara Tahun 2013 Nomor 356.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberin Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Badan Negara Tahun 2022 Nomor 117.

LAIN – LAIN :

Artanti, Ardelia, Skripsi: *Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Wanita DiLembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*, Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2022.

Wawancara dengan bapak Ahmad Ivan, selaku Staf registrasi binadik pada lembaga pemasyarakatan Kediri pada tanggal 4 April 2024.